

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi bahwa *“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”*. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi *“alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”*. Definisi tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tidaklah jauh berbeda.

Tugas Polri tidak lain adalah melakukan penyelidikan atau penyidikan, khususnya terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar. Dalam hal ini Polri dalam menjalankan

tugasnya harus sesuai dengan<sup>1</sup> perundang-undang yang berlaku dan selalu memegang teguh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pihak kepolisian jangan sampai goyah dalam memberantas pelaku penyalahgunaan narkoba, tidak hanya pihak kepolisian saja tetapi juga hakim dan jaksa, yang disebabkan pengaruh dari pihak-pihak manapun.

Beberapa tahun yang lalu tepatnya di Polres Kota Malang pernah ada kasus dimana seorang aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba. Aparat kepolisian ini ditangkap pada waktu pemeriksaan tes urin. Setiap kali ada pemeriksaan tes urin, anggota polisi tersebut selalu menghindar atau tidak pernah hadir. Pada saat itu, anggota lainnya mulai mencurigai tindakannya tersebut. dan ternyata memang benar bahwa anggota polisi tersebut telah memakai narkoba. Maka, anggota polisi tersebut telah melanggar Undang-Undang Narkoba dan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Saat ini banyak anggota kepolisian tepatnya penyidik kepolisian yang menangani kasus tindak pidana terkait dengan penyalahgunaan narkoba yang tersangkanya bukan dari masyarakat biasa, tetapi dari anggota kepolisian baik itu sebagai pengedar maupun sebagai pemakai. Anggota polri yang dimana seharusnya sebagai alat negara untuk menegakkan hukum dalam memberantas kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba, tetapi terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan

---

<sup>1</sup> Sadjijono. 2008. *Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*. Surabaya. Laksbang Meditama. Hal. 90.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Iptu Subandi Paur Indentifikasi POLRES Kota Malang. 14 November 2018.

narkotika. Hal tersebut tentu saja membuat rasa percaya masyarakat terhadap aparat penegak hukum menjadi hilang, yang memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi *“anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Walaupun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi”*. Peraturan Disiplin Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan, kode etik kepolisian diatur dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2003 *jo* Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi bahwa *“anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan hal-hal yang menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah atau Kepolisian Negara Republik Indonesia”* dan *“setiap anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri”*. Maka, oknum polisi yang menggunakan narkotika berarti telah melanggar aturan disiplin

---

<sup>3</sup> Rizky Pamella Hermawan. 2014. *Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri*. Malang.

dan kode etik, karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia.<sup>4</sup> Dalam hal ini polisi yang melakukan penyalahgunaan atas jabatan, tugas serta wewenangnya. Dimana yang seharusnya bertugas untuk memberikan panutan kepada masyarakat, memberikan contoh yang baik, bahkan ikut serta dalam proses pemberantasan kejahatan tindak pidana narkoba. Namun sebaliknya, mereka justru ikut serta dalam tindakan menyalahgunakan narkoba, sehingga hal tersebut memberikan kesan atau pandangan yang negatif terhadap citra polisi.

Pada tahun 2016 dalam data Indonesia Police Watch (IPW) mengatakan bahwa setiap tahun rata-rata terdapat 200 polisi yang terlibat dalam kasus narkoba. Pada tanggal 11 Oktober 2016 sudah terdapat 3 (tiga) anggota polisi yang ditangkap karena narkoba. Tepatnya di Jakarta Barat yaitu di Diskotik Milles Mangga Besar tertangkap anggota polisi yang sedang mengonsumsi narkoba. Yang kedua ditangkap di Bali seorang polisi yang sedang menjadi kurir narkoba, dan yang ketiga di Daerah Istimewa Yogyakarta seorang anggota polisi tertangkap sedang melakukan pesta sabu.<sup>5</sup>

Apabila anggota polisi terbukti bahwa telah menyalahgunakan narkoba maka ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi bahwa, *“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara*

---

<sup>4</sup> Anonim, *Proses Hukum Oknum Polisi yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba*, dalam <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 3 Juni 2018.

<sup>5</sup> Tempo.com, *Data IPW : Setiap Tahun Rata-rata 200 Polisi Terlibat Narkoba*, dalam <https://nasional.tempo.co>, diakses tanggal 3 Juni 2018.

*Republik Indonesia apabila: dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”.*

Dengan demikian, meskipun anggota Polri tersebut sudah dipidana sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, baru anggota Polri tersebut dapat diberhentikan dari jabatannya secara tidak hormat, apabila menurut pertimbangan dari pejabat yang berwenang bahwa anggota Polri tersebut tidak dapat untuk dipertahankan dalam dinas kepolisian. Pemberhentian anggota kepolisian dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 12 ayat (2) PP 1 Tahun 2003). Jadi, meskipun anggota polisi juga termasuk sebagai warga sipil, tetapi ada perbedaan dalam melakukan proses penyidikan perkaranya dengan masyarakat biasa. Karena, seorang anggota Polri tidak hanya tunduk pada peraturan perundang-undangan, anggota Polri juga terikat dalam aturan disiplin dan kode etik yang harus dipatuhi juga.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan tindak pidana narkoba, khususnya yang dilakukan oleh anggota kepolisian dengan judul penelitian **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri Dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus Di POLRES Kota Malang)”**.

---

<sup>6</sup>Anonim, *Op.cit.* <http://www.hukumonline.com>.

## B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam makalah ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor penyebab aparat kepolisian melakukan tindak pidana narkoba ?
2. Apa saja jenis tindak pidana narkoba yang dilakukan aparat kepolisian ?
3. Apa saja upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap anggotanya yang melakukan tindak pidana narkoba, hambatan dan solusinya?

## C. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan dari rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab aparat kepolisian melakukan tindak pidana narkoba.
- 2) Untuk mengetahui jenis tindak pidana narkoba yang dilakukan aparat kepolisian.
- 3) Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap anggotanya yang melakukan tindak pidana narkoba, hambatan dan solusinya.

## D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan agar penelitian yang dilakukan bermanfaat sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, bidang hukum pidana pada khususnya. Serta dapat dijadikan sebagai penambah literatur bagi banyak pihak yang akan mendalami tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian, khususnya di Kota Malang.

## E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini bagi penulis dapat berguna sebagai penambah pengetahuan dalam hal permasalahan yang diteliti dan sebagai syarat untuk penulisan tugas Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum.

### 2. Bagi Kalangan Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan wawasan maupun referensi bagi kalangan dalam hal faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri.

### 3. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan memberikan sebuah paradigma baru bagi penegak hukum tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri.

#### F. Metode Penelitian

Penelitian dengan cara yang digunakan penulis untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas permasalahan di atas. Maka penulis memerlukan suatu metode penulisan hukum, meliputi :

##### 1. Metode Pendekatan

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu secara yuridis berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan secara sosiologis yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan aparat kepolisian untuk melakukan tindak pidana narkotika dan jenis tindak pidana yang dilakukannya, upaya penanggulangan, hambatan dan solusinya di POLRES Kota Malang.

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan yang akan diteliti, yakni penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.



## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Kepolisian Resort Malang Kota, Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19, Samaan, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112.

## 3. Jenis Data

### a. Data Primer

Berupa data yang diperoleh dari dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat dan hasil wawancara serta lain – lain, yang diperoleh di POLRES Kota Malang yang berlokasi di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19, Samaan, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112, tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri, jenis tindak pidananya dan upaya penanggulangannya serta hambatan apa saja yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi anggotanya yang melakukan tindak pidana narkoba.

### b. Data Sekunder

Berbagai perundang-undangan dan jurnal, literatur hukum yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

### c. Data Tersier

Adalah jenis data mengenai pengertian baku, istilah baku yang diperoleh dari Ensiklopedia, Kamus dan lain - lain.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan untuk melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan sebagai berikut:

### 1) Wawancara

Wawancara penelitian adalah suatu metode penelitian yang meliputi pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara pewawancara dan responden. Penentuan responden dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu salah satu teknik dimana peneliti menentukan pengambilan data dengan cara menetapkan ciri – ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara kepada Iptu Subandi selaku Paur Identifikasi POLRES Kota Malang, Ipda Yulius Sapto Edi selaku Kasi Propam POLRES Kota Malang dan AKP Catur selaku Kasubag Hukum Sumda POLRES Kota Malang

## 2) Dokumen

## 5. Metode Analisa Data

Metode Analisa Data adalah tahap yang paling penting dalam menentukan suatu penelitian yaitu menguraikan dan memecahkan masalah yang diangkat dalam penulisan ini berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah ke dalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat deskriptif.

## G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan ini, penulis akan menyajikan 4 bab yang terdiri dari sub – sub bab, sistematik penulisan secara singkat adalah sebagai berikut:

## BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat hal – hal yang melatar belakangi pemilihan topik dari penulisan skripsi dan sekaligus menjadi pengantar umum dalam memahami penulisan secara keseluruhan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Kegunaan Penulisan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulisan akan menguraikan landasan teori atau kajian teori yang mendukung hasil penelitian dalam membahas permasalahan yang diperoleh oleh penulis.

## BAB III: PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jawaban yang sesuai dengan rumusan masalah, yaitu faktor-faktor penyebab aparat kepolisian melakukan tindak pidana narkoba, jenis tindak pidana narkoba yang dilakukan aparat kepolisian, dan upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap anggotanya yang melakukan tindak pidana narkoba, hambatan dan solusinya. Dalam pembahasan akan dikaitkan dengan kajian teori serta landasan yuridis yang tepat.

## BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang didalamnya berisikan suatu kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian Hukum.